



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2025) pp: 3199-3205

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Transformasi Kebijakan Akuntansi Persediaan dalam Implementasi PSAK 202 dan Dampaknya terhadap Nilai Persediaan, Pengungkapan, serta Akuntabilitas Perusahaan Publik di Indonesia

Rakhazia Ramadan¹, Fatimah Azzahra Prawestri², Linda Permatasari Loe Siu Mei³, Hanna Sayyidah⁴, Rinny Meidiyustiani⁵

Universitas Budi Luhur^{1,2,3,4,5}

2332500210@student.budiluhur.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas transformasi kebijakan akuntansi persediaan dari PSAK No. 14, yang berbasis biaya perolehan, menuju PSAK No. 202 tentang Akuntansi Produk Agrikultur yang menggunakan pendekatan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual (FVLCS). Perubahan ini dianalisis melalui metode Systematic Literature Review (SLR) terhadap 10 literatur primer periode 2021–2025 yang diperoleh dari Google Scholar, ResearchGate, dan situs resmi IAI. Studi ini mengkaji proses transisi standar yang diadaptasi dari IAS 41 untuk meningkatkan relevansi dan kualitas pelaporan keuangan sektor agrikultur di Indonesia. Hasil sintesis menunjukkan bahwa penerapan PSAK 202 mampu meningkatkan relevansi nilai persediaan karena nilai yang disajikan lebih mencerminkan kondisi pasar terkini. Namun demikian, penggunaan nilai wajar menimbulkan volatilitas laba, terutama ketika estimasi didasarkan pada input Level 3 dalam Hierarki Nilai Wajar yang mengandung subjektivitas tinggi. Selain itu, terdapat tantangan implementasi seperti kesenjangan kompetensi SDM, keterbatasan data pasar, serta meningkatnya kebutuhan pengungkapan yang lebih detail dan transparan. Di sisi lain, PSAK 202 memberikan dampak positif berupa peningkatan transparansi dan akuntabilitas perusahaan melalui penguatan tata kelola perusahaan (GCG). Meski demikian, trade-off antara relevansi dan reliabilitas tetap menjadi isu utama dalam penerapannya. Penelitian ini menyimpulkan perlunya program pelatihan SDM, standardisasi data pasar oleh regulator seperti IAI dan OJK, serta penelitian empiris lanjutan untuk mengukur dampak agregat terhadap kinerja perusahaan. Temuan ini berkontribusi pada penguatan harmonisasi standar akuntansi Indonesia dengan praktik internasional.

Kata kunci: PSAK 202, Akuntansi Persediaan Agrikultur, Nilai Wajar, Pengungkapan Keuangan, Akuntabilitas Perusahaan Publik

1. Latar Belakang

Persediaan merupakan aset krusial yang menentukan posisi keuangan dan kinerja laba sebuah entitas, menjadikannya salah satu akun terpenting dalam laporan keuangan. Di Indonesia, kebijakan akuntansi persediaan diatur secara fundamental melalui Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 14. Standar ini telah lama menjadi pedoman utama bagi perusahaan, terutama di sektor perdagangan dan manufaktur, yang menekankan pada prinsip biaya perolehan dan pengukuran menggunakan metode seperti FIFO atau rata-rata tertimbang. Konsistensi dalam penerapan PSAK No. 14, seperti yang ditunjukkan oleh berbagai studi kasus di PT Enseval Putera Megatrading Tbk dan CV Dandy Brothers, menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap standar ini menjadi tolok ukur utama dalam penyajian persediaan konvensional yang akurat dan dapat diperbandingkan bagi Perusahaan Publik. Seiring berkembangnya kompleksitas bisnis, terutama di sektor-sektor khusus seperti agrikultur dan produk berbasis Syariah, standar akuntansi yang bersifat umum seperti PSAK No. 14 mulai terasa kurang memadai. Keunikan aset biologis yang mengalami pertumbuhan atau transformasi alami memerlukan pendekatan pengukuran yang berbeda dari persediaan barang dagang biasa. Kebutuhan inilah yang mendorong Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan PSAK No. 202 tentang Akuntansi Produk Agrikultur. Standar ini menandai adanya transformasi kebijakan, yaitu pergeseran fokus pengukuran persediaan hasil panen dari model biaya historis ke nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual (Fair Value less Costs to Sell) pada titik panen, sebuah pendekatan yang membawa konsekuensi signifikan dalam pelaporan.

Meskipun menjadi mandat standar baru, proses transisi dari praktik lama menuju kepatuhan penuh terhadap PSAK 202 bukanlah tanpa kendala. Beberapa penelitian di lapangan telah menemukan adanya disparitas dalam penerapannya. Kontras dengan kepatuhan tinggi pada PSAK 14, studi pada entitas seperti Agro Tawon Rimba Raya Lawang dan Astra Motor Kolaka menunjukkan bahwa sistem pencatatan yang digunakan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan PSAK 202, seringkali masih menyerupai metode konvensional. Tantangan ini diperparah dengan kompleksitas dalam menentukan nilai wajar dan kebutuhan harmonisasi standar di sektor-sektor terkait. Fenomena ini menggarisbawahi adanya kesenjangan antara tuntutan regulasi baru dan praktik akuntansi yang dijalankan, yang memerlukan evaluasi mendalam, terutama bagi entitas yang terikat pada akuntabilitas publik.

Perubahan fundamental dalam basis pengukuran dari biaya ke nilai wajar yang diamanatkan oleh PSAK 202 memiliki dampak langsung pada tiga pilar utama pelaporan keuangan perusahaan publik. Pertama, hal ini mengubah nilai persediaan yang disajikan, yang otomatis memengaruhi perhitungan laba dan ekuitas. Kedua, tuntutan pengakuan nilai wajar menuntut tingkat pengungkapan yang jauh lebih detail dan transparan mengenai asumsi, metode estimasi nilai wajar, serta risiko yang melekat. Ketiga, dan yang paling penting, peningkatan transparansi dan konsistensi ini sangat menentukan akuntabilitas perusahaan kepada investor dan pemangku kepentingan publik. Oleh karena itu, kegagalan dalam mengimplementasikan standar ini secara tepat berpotensi menurunkan kualitas informasi keuangan dan kredibilitas perusahaan di pasar modal.

Mengingat pentingnya persediaan dan kompleksitas yang timbul dari transisi ke PSAK 202, penelitian yang komprehensif mengenai isu ini menjadi sangat relevan dan mendesak. Meskipun studi kasus individual telah mengidentifikasi tingkat kepatuhan di beberapa perusahaan, belum banyak kajian yang secara sistematis menganalisis transformasi kebijakan ini secara holistik, serta mengukur secara agregat dampaknya terhadap nilai persediaan, kedalaman pengungkapan, dan akuntabilitas Perusahaan Publik di Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengisi kekosongan tersebut, memberikan wawasan empiris bagi regulator, praktisi, dan akademisi mengenai efektivitas standar baru ini dan implikasinya terhadap tata kelola perusahaan di tengah tantangan spesialisasi sektor.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, mengevaluasi, dan menginterpretasikan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik transisi dari PSAK 14 ke PSAK 202 serta dampaknya terhadap kebijakan pengukuran nilai wajar persediaan produk agrikultur. Metode SLR dipilih karena mampu memberikan gambaran menyeluruh atas hasil penelitian sebelumnya, menemukan pola yang konsisten maupun perbedaan, serta mengungkapkan celah penelitian yang dapat dijadikan dasar analisis lebih lanjut.

Proses SLR dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, peneliti mengidentifikasi fokus topik dan pertanyaan penelitian, yaitu mengenai bagaimana perubahan standar akuntansi dari PSAK 14 ke PSAK 202 berimplikasi pada penerapan metode nilai wajar persediaan produk agrikultur di Indonesia, khususnya pada perusahaan publik sektor agrikultur. Kedua, dilakukan penentuan kriteria seleksi artikel, yaitu artikel ilmiah, prosiding, dan publikasi resmi yang membahas PSAK 14, PSAK 202, IAS 41 (Agriculture), serta isu-isu terkait pengukuran nilai wajar, dampaknya terhadap nilai persediaan, pengungkapan, maupun akuntabilitas perusahaan. Rentang waktu publikasi dibatasi dari tahun 2021 hingga 2025 agar hasil analisis mencerminkan kondisi terkini.

Tahap ketiga adalah pencarian literatur yang dilakukan melalui database akademik seperti Google Scholar, ResearchGate, dan repository universitas, serta situs resmi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan publikasi kantor akuntan publik. Dari proses pencarian ini, diperoleh sejumlah artikel yang relevan. Tahap keempat adalah proses seleksi studi, di mana artikel-artikel yang telah terkumpul dibaca secara menyeluruh untuk memastikan kesesuaiannya dengan topik penelitian (fokus pada PSAK 202/Agrikultur, bukan PSAK 13/240). Artikel yang tidak relevan dengan isu persediaan agrikultur atau tidak berada dalam rentang tahun penelitian dikeluarkan dari daftar kajian. Tahap kelima adalah sintesis dan analisis data. Pada tahap ini, hasil dari setiap artikel disajikan dalam bentuk tabel literatur review yang memuat informasi mengenai penulis, tahun, judul penelitian, metode yang digunakan, dan temuan utama. Setelah itu dilakukan analisis komparatif untuk melihat pola yang konsisten, perbedaan hasil penelitian, serta kontribusi terhadap kajian transisi PSAK 14 ke PSAK 202.

Tahap terakhir adalah penyajian hasil penelitian, yaitu memaparkan temuan dalam bentuk pembahasan naratif dan tabel sistematis. Dengan metode SLR ini, diharapkan penelitian dapat menyajikan gambaran yang

komprehensif mengenai dampak transisi standar akuntansi terhadap pengukuran nilai persediaan produk agrikultur, sekaligus memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi perusahaan publik, regulator, serta akademisi.

Tujuan sistematis dalam penelitian ini merujuk pada pencapaian yang direncanakan dengan mengikuti langkah-langkah yang terstruktur dan terorganisir melalui metode Systematic Literature Review (SLR). Dalam konteks penelitian akuntansi, khususnya terkait transisi dari PSAK 14 ke PSAK 202, tujuan sistematis biasanya berarti:

1. Mencapai Hasil yang Spesifik: Menghasilkan gambaran komprehensif mengenai dampak transisi PSAK 14 ke PSAK 202 terhadap kebijakan pengukuran nilai persediaan, kualitas pengungkapan, dan akuntabilitas pada perusahaan publik di Indonesia.
2. Menggunakan Proses yang Terstruktur: Mengikuti tahapan yang jelas mulai dari identifikasi topik, penentuan kriteria seleksi artikel, pencarian literatur, seleksi studi, ekstraksi data, hingga sintesis hasil penelitian.
3. Memastikan Efisiensi dan Efektivitas: Dengan menggunakan literatur terpilih (2021–2025) yang relevan, penelitian ini mampu menyajikan temuan yang efisien, efektif, dan terkini untuk menjawab rumusan masalah penelitian.
4. Menyediakan Dasar Teoritis dan Praktis: Memberikan kontribusi akademis berupa kajian literatur yang mendalam, serta kontribusi praktis berupa rekomendasi bagi perusahaan publik, regulator, maupun investor terkait penerapan PSAK 202.
5. Menjamin Transparansi Penelitian: Melalui penyajian langkah-langkah metodologis yang sistematis, penelitian ini memastikan bahwa hasil yang diperoleh dapat ditelusuri, diverifikasi, dan digunakan sebagai dasar penelitian selanjutnya.

Beberapa penelitian dan pengembangan yang membahas mengenai pengukuran nilai wajar persediaan agrikultur serta transisi PSAK 14 ke PSAK 202 menjadi dasar penting dalam kajian ini. Artikel-artikel yang digunakan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria tahun publikasi (2021–2025) serta relevansinya dengan topik. Data hasil penelitian yang dimasukkan dalam artikel ini merupakan analisis dan rangkuman dari literatur yang disajikan secara sistematis dalam tabel berikut.

| No | Penulis | Tahun | Judul | Metode | Hasil Utama |
|----|-----------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | N.K.R.A Yudana, et al | 2023 | Efektif PSAK 202 Akuntansi Produk Agrikultur | Regulasi / Deskriptif | PSAK 202 (mengadopsi IAS 41) mewajibkan pengukuran aset biologis dan produk agrikultur pada Nilai Wajar dikurangi Biaya untuk Menjual (Fair Value Less Cost to Sell) |
| 2 | IFerdawati, et al. | 2024 | Pendampingan dan Bimbingan Teknis Akuntansi Persediaan Sesuai PSAK 202 Bagi Guru MGMP Akuntansi | Pengabdian Masyarakat | Menyoroti pentingnya peningkatan kompetensi SDM dalam memahami metode penilaian nilai wajar agrikultur yang kompleks dalam PSAK 202. |

| | | | | | |
|---|--------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Intan Putri Suryati, et al. | 2025 | Pengkuan dan Pengungkapan Akuntansi Persediaan Perusahaan Manufaktur | Systematic Literature Review (SLR) | Menunjukkan kepatuhan pada PSAK 14 (basis biaya) masih dominan di sektor non-agrikultur, menggarisbawahi kontrasnya model nilai wajar PSAK 202 dan tantangan transisinya. |
| 4 | Yudana, Djajanto, Fatimah | 2025 | Analisis Implementasi PSAK 202 terhadap Persediaan Produk Agrikultur | Deskriptif Kualitatif | PSAK 202 meningkatkan relevansi nilai persediaan hasil panen, namun menuntut proses penilaian dan pengungkapan biaya untuk menjual yang transparan . |
| 5 | T.P.V. Tombuku, et al. | 2022 | Analisis Penerapan Akuntansi Persediaan Barang Habis Pakai (PSAP 05) | Deskriptif Kualitatif | Menguatkan perlunya kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan persediaan dengan standar, menjadi dasar perbandingan kompleksitas nilai wajar PSAK 202. |
| 6 | U. Tauhid & M. Saddam | 2021 | Analisis Akuntansi Persediaan Barang Dagang Berdasarkan PSAK No. 14 | Kualitatif Komparatif | Menegaskan metode biaya (FIFO/Average) sebagai basis PSAK 14, yang digeser oleh PSAK 202 untuk agrikultur, menciptakan tantangan implementasi. |
| 7 | S.R.E Trenggono | 2024 | Analisis Perlakuan Akuntansi Persediaan Berdasarkan PSAK No. 14 | Deskriptif Kualitatif | Menekankan ketepatan pencatatan dan pengukuran persediaan pada metode biaya, yang menjadi dasar perbandingan saat transisi ke nilai wajar agrikultur pada PSAK 202. |
| 8 | H. A. K. Putra | 2021 | Dampak Pemilihan Metode Penilaian Persediaan terhadap Profitabilitas | Deskriptif | Menunjukkan variasi penerapan PSAK 14 dan perlunya konsistensi pengungkapan, yang menjadi fokus utama dalam meningkatkan akuntabilitas di bawah PSAK 202. |
| 9 | Ni Putu Ayu Amara A.P., et al. | 2024 | Perlakuan Akuntansi Persediaan dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan | Deskriptif Kualitatif | Perlakuan akuntansi persediaan yang konsisten dan patuh pada PSAK 14/202 sangat memengaruhi akurasi penyajian aset dan beban pokok penjualan (HPP). |

| | | | | | |
|----|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | Irawan | 2024 | Dampak Pemilihan Metode Penilaian Persediaan terhadap Profitabilitas | Studi empiris (kuantitatif) | Pemilihan metode FIFO vs. Average berdampak langsung pada Beban Pokok Penjualan (HPP) dan Laba Kotor , yang secara signifikan memengaruhi rasio profitabilitas perusahaan. |
|----|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tabel 1. Literatur Review

3. Hasil dan Diskusi

Berdasarkan hasil sintesis dan analisis komparatif dari sepuluh literatur primer yang ditelaah melalui kerangka kerja *Systematic Literature Review* (SLR), dapat disimpulkan bahwa transisi kebijakan akuntansi persediaan di sektor agrikultur Indonesia dari prinsip Biaya Perolehan (PSAK 14) menuju konsep Nilai Wajar Dikurangi Biaya untuk Menjual (FVLCS) di bawah PSAK 202 memiliki peran strategis dan transformatif. Perubahan standar ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan menekankan pada pengukuran dan pengakuan aset biologis serta produk agrikultur yang lebih relevan dengan kondisi pasar terkini, sejalan dengan International Accounting Standard (IAS) 41. Penerapan PSAK 202 ini menuntut perusahaan publik untuk lebih transparan dalam menyajikan nilai persediaan hasil panen yang mencerminkan potensi ekonomi *up-to-date* mereka (IAI Global, 2023; Yudana, Djajanto, & Fatimah, 2025). Studi literatur secara konsisten menunjukkan bahwa penggunaan Nilai Wajar dapat meningkatkan relevansi laporan keuangan bagi investor memberikan dasar yang lebih baik untuk pengambilan keputusan—karena nilai aset yang dilaporkan mencerminkan kondisi pasar terkini. Hal ini berimplikasi pada meningkatnya daya tarik perusahaan di mata investor, karena informasi yang disajikan lebih akurat, *up-to-date*, dan dapat diandalkan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi (Yudana, Djajanto, & Fatimah, 2025).

Namun, transisi ini juga membawa tantangan baru. Beberapa penelitian menegaskan bahwa penerapan nilai wajar dapat menimbulkan volatilitas yang signifikan dalam laporan laba rugi, sehingga kinerja perusahaan dapat terlihat fluktuatif dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi karena adanya pengakuan untung atau rugi dari estimasi perubahan harga pasar, bukan dari operasional penjualan murni. Volatilitas ini berpotensi menimbulkan persepsi berbeda di kalangan investor, terutama jika terjadi ketidakstabilan harga komoditas agrikultur. Oleh karena itu, selain menyesuaikan diri dengan PSAK 202, perusahaan publik juga harus memperkuat sistem tata kelola dan pengawasan internal untuk memastikan bahwa informasi nilai wajar yang disajikan benar-benar kredibel dan sesuai dengan kondisi pasar yang ada. Dengan demikian, peran transisi PSAK 202 bagi perusahaan publik di Indonesia sangat strategis. Perubahan standar ini diharapkan mampu meningkatkan keterbandingan, transparansi, dan keandalan laporan keuangan, sekaligus membawa praktik akuntansi Indonesia lebih dekat dengan standar internasional. Akan tetapi, efektivitas penerapannya sangat ditentukan oleh kesiapan perusahaan, kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan infrastruktur sistem yang memadai.

1. Transformasi Basis Pengukuran dan Trade-off Relevansi Vs. Reliabilitas

PSAK 202 menegaskan bahwa aset biologis dan Produk Agrikultur harus diukur pada Nilai Wajar Dikurangi Biaya untuk Menjual (FVLCS) setelah pengakuan awal (IAI Global, 2023). Hal ini merupakan pergeseran mendasar dari prinsip utama PSAK 14, yang menekankan pengukuran pada nilai terendah antara Biaya Perolehan atau Nilai Realisasi Bersih (*Net Realizable Value*). Regulasi terbaru ini secara langsung mendorong perusahaan agrikultur untuk mengutamakan pengukuran nilai wajar karena dianggap memberikan informasi yang lebih relevan bagi pengguna laporan keuangan.

Beberapa penelitian mendukung pentingnya penggunaan nilai wajar dalam produk agrikultur. Yudana, Djajanto, dan Fatimah (2025) menegaskan bahwa model nilai wajar lebih mencerminkan kondisi pasar dan memperkuat transparansi laporan keuangan. Perubahan basis pengukuran ini memiliki dampak langsung pada neraca, karena Nilai Wajar mencerminkan potensi ekonomi terkini dari persediaan tersebut pada titik panen, memberikan informasi yang jauh lebih *up-to-date*. Sementara itu, studi literatur menunjukkan bahwa meskipun relevan, penerapan nilai wajar membawa tantangan volatilitas laba yang signifikan dan isu reliabilitas, terutama karena bergantung pada estimasi dan asumsi yang subjektif, khususnya pada aset biologis muda. Hal ini menandakan bahwa meskipun pengakuan dan pengukuran nilai wajar memiliki manfaat besar, perusahaan publik tetap harus berhati-hati dan memastikan penggunaan data serta metode penilaian yang kredibel, bahkan perlu mempertimbangkan instrumen lindung nilai (*hedging*) untuk menyeimbangkan volatilitas akuntansi yang ditimbulkan oleh PSAK 202 dengan risiko ekonomi riil.

2. Pengungkapan, Dampak pada Kinerja, dan Peran Tata Kelola Perusahaan (GCG)

Pengungkapan persediaan agrikultur dalam PSAK 202 menjadi elemen penting untuk mendukung transparansi laporan keuangan. Standar ini mengharuskan perusahaan menyajikan informasi detail mengenai metode pengukuran, asumsi utama, serta analisis sensitivitas terhadap perubahan nilai wajar, khususnya untuk pengukuran Level 3 dalam Hierarki Nilai Wajar (PSAK 68). Tujuannya adalah agar investor dan pemangku kepentingan lain memperoleh gambaran yang lebih lengkap atas kondisi aset perusahaan. Studi literatur menegaskan bahwa pengungkapan yang komprehensif mampu mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap Laporan Keuangan.

Selain itu, penerapan nilai wajar berdampak langsung pada kinerja dan profitabilitas perusahaan. Penyesuaian nilai wajar memengaruhi rasio profitabilitas, yang kemudian memengaruhi persepsi kinerja perusahaan. Dengan kata lain, PSAK 202 berpotensi meningkatkan daya tarik perusahaan publik, tetapi juga menuntut manajemen untuk lebih berhati-hati dalam mengelola fluktuasi laporan keuangan. Lebih jauh, tata kelola perusahaan (GCG) menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi PSAK 202. Penelitian menguatkan bahwa praktik tata kelola yang baik mampu memperkuat kredibilitas informasi nilai wajar, sehingga respons investor menjadi lebih positif. Dengan pengawasan internal yang kuat, peran aktif komite audit, independensi penilai aset (*appraiser*), dan keterbukaan informasi, perusahaan dapat mengurangi risiko manipulasi nilai wajar. Hal ini membuktikan bahwa penerapan PSAK 202 tidak bisa hanya dipandang dari aspek teknis akuntansi, tetapi juga dari bagaimana perusahaan memastikan akuntabilitas dan integritas dalam pelaporan keuangannya.

3. Tantangan Implementasi, Kesenjangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), dan Sintesis Akhir

Transisi ke PSAK 202 menghadirkan banyak manfaat, tetapi sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaannya di lapangan menghadapi tantangan yang tidak kecil. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan data pasar yang andal dan kompleksitas dalam menentukan dan mengukur komponen Biaya untuk Menjual (*Cost to Sell*), yang membutuhkan estimasi prospektif. Selain itu, kesenjangan kompetensi SDM akuntansi juga menjadi kendala. Staf akuntansi dituntut untuk memahami penilaian berbasis pasar, analisis statistik, dan proyeksi biaya, di luar penguasaan sistem pencatatan konvensional (Ferdawati, et al., 2024).

Kompleksitas pengukuran diperkuat oleh adopsi Hierarki Nilai Wajar (PSAK 68) (Level 1, 2, dan 3). Aset biologis dengan pasar terbatas sering memaksa perusahaan menggunakan Level 3, yang bergantung pada model Arus Kas Terdiskonto (DCF) dan asumsi yang sangat subjektif tentang pertumbuhan dan harga masa depan. Ketergantungan pada model yang rentan terhadap asumsi ini secara langsung menuntut peran aktif penilai independen dan pengawasan yang ketat dari manajemen dan auditor.

Melalui literatur yang tersedia, dapat disintesis bahwa transisi dari PSAK 14 ke PSAK 202 menjadi langkah penting menuju laporan keuangan yang lebih relevan, transparan, dan sesuai standar internasional. Berdasarkan penelitian empiris dan regulasi, beberapa poin utama yang muncul:

- Perusahaan agrikultur dituntut untuk mengadopsi pengukuran FVLCS yang meningkatkan relevansi nilai persediaan, namun secara inheren menciptakan volatilitas pada laporan laba rugi.
- Kemampuan perusahaan dalam mengukur dan memverifikasi nilai wajar sangat tergantung pada kualitas infrastruktur sistem, ketersediaan data pasar Level 1 atau 2, dan peningkatan kompetensi SDM dalam mengaplikasikan model valuasi (Level 3).
- Perusahaan dengan tata kelola yang baik (termasuk peran aktif komite audit dan transparansi pengungkapan) cenderung lebih mampu memitigasi risiko volatilitas dan memanfaatkan manfaat dari penerapan nilai wajar.
- Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kesiapan perusahaan publik baik dari sisi sistem informasi, *governance*, sumber daya manusia, maupun dukungan regulasi dan pasar yang memadai.

Secara keseluruhan, meskipun PSAK 202 menjanjikan perbaikan dalam hal relevansi dan kualitas pelaporan keuangan di sektor agrikultur, keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan perusahaan publik dalam mengatasi tantangan teknis pengukuran dan memperkuat mekanisme akuntabilitas.

4. Kesimpulan

Transformasi kebijakan akuntansi persediaan, khususnya dengan diterapkannya PSAK No. 202, merupakan langkah strategis yang didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan relevansi laporan keuangan sektor agrikultur di Indonesia agar sejalan dengan standar internasional (IAS 41). Pergeseran pengukuran dari prinsip biaya perolehan (PSAK 14) menjadi Nilai Wajar Dikurangi Biaya untuk Menjual (FVLCS) untuk aset biologis dan produk agrikultur pada saat panen memiliki implikasi transformatif terhadap pelaporan keuangan perusahaan publik. Secara umum, hasil penelitian menunjukkan beberapa poin utama: 1. Peningkatan Relevansi Pelaporan: Penerapan Nilai Wajar di bawah PSAK 202 secara signifikan meningkatkan relevansi nilai persediaan yang disajikan di neraca, karena mencerminkan potensi ekonomi terkini dari persediaan tersebut sesuai kondisi pasar. Hal ini memberikan dasar yang lebih baik bagi investor dalam pengambilan keputusan. 2. Trade-off Volatilitas dan Reliabilitas: Meskipun relevan, basis pengukuran nilai wajar menimbulkan volatilitas laba yang signifikan karena adanya pengakuan untung/rugi dari estimasi perubahan harga pasar, bukan murni dari operasional penjualan. Hal ini memunculkan tantangan dalam menjaga reliabilitas data, terutama karena penilaian (terutama Level 3 Hierarki Nilai Wajar) sangat bergantung pada asumsi dan estimasi subjektif. 3. Kebutuhan Transparansi Pengungkapan: PSAK 202 menuntut tingkat pengungkapan yang jauh lebih detail dan transparan (mengenai asumsi, metode estimasi, dan analisis sensitivitas), yang secara langsung mendukung akuntabilitas perusahaan publik kepada pemangku kepentingan dan mengurangi asimetri informasi. 4. Tantangan Implementasi SDM dan Sistem: Tantangan terbesar dalam transisi ini adalah kesenjangan kompetensi SDM akuntansi yang harus menguasai model valuasi berbasis pasar yang kompleks, serta keterbatasan data pasar yang andal dan kebutuhan infrastruktur sistem yang memadai untuk mengimplementasikan pengukuran Nilai Wajar secara konsisten dan kredibel.

Referensi

1. Andini Utari Putri, V. M. (2022). ANALISIS PENERAPAN PENCATATAN DAN PENILAIAN PERSEDIAAN BARANG DAGANG MENURUT PSAK NO 14 PADA CV DANDY BROTHERS KOTA BENGKULU. JURNAL ILMIAH EKONOMI GLOBAL MASA KINI VOLUME 13 No. 01 Juli 2022, 17-22.
2. Ferdawati, E. S. (2024). Pendampingan dan Bimbingan Teknis Akuntansi Persediaan Sesuai PSAK 202 Bagi Guru MGMP Akuntansi Sumatera Barat. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 2 (4) , November 2024, 582-591.
3. Hardilla, S. S. (2025). ANALISIS PENERAPAN METODE PENCATATAN DAN PENILAIAN PERSEDIAAN BARANG DAGANG BERDASARKAN PSAK NO 202 PADA ASTRA MOTOR KOLAKA. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, Vol. 8, No. 2, Mei 2025, 456-464.
4. Intan Putri Suryati, A. P. (2025). PENGAKUAN DAN PENGUNGKAPAN AKUNTANSI PERSEDIAAN PERUSAHAAN MANUFAKTUR. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)* Volume 2 No 3- Maret 2025, 807-817.
5. Mikael Valdeherian Barnix, R. J. (2024). Analisis Penerapan Akuntansi Persediaan Berdasarkan PSAK 14. *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* Vol 5 No 5 (2024), 4065-4071.
6. Ni Komang Rivia Azarine Yudana, L. D. (2025). Analisis Implementasi PSAK 202 terhadap Persediaan Produk Agrikultur dan Produk Hasil Pemrosesan setelah Panen guna Mengoptimalkan Manajemen Persediaan pada Agro Tawon Rimba Raya Lawang. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, Volume 13(2), 2025, 114-130.
7. PUTRI, N. P. (2024). PERLAKUAN AKUNTANSI PERSEDIAAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PADA PT CUT MAKE TRIM DI DENPASAR. BALI: POLITEKNIK NEGERI BALI.
8. Putu Ayu Diah Widari Putri, I. A. (2024). ANALISIS PERAN AKUNTANSI KEPERILAKUAN DALAM KEBIJAKAN PERUSAHAAN MENGHADAPI TRANSFORMASI DIGITAL REVOLUSI INDUSTRI 4.0. *JURNAL SUTASOMA* Vol.03 No.01 – Desember 2024 , 1-9.
9. Rizqiyatul Maufiroh, M. I. (2025). ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PERSEDIAAN BERDASARKAN PSAK NO. 14 PADA CV XYZ. *Journal of Accounting And Financial Issue* Volume 6, Nomor 1, Mei 2025, 1-12.
10. Royke Palar, W. P. (2020). PENERAPAN PSAK NO 14 ATAS PERSEDIAAN BARANG DAGANG (STUDI KASUS PADA PT. ASIA TENGGARA MURNI). *Jurnal Riset Akuntansi* 15(1), 2020, 36-41, 36-41.
11. Sheva Rajaby Eliya Trenggono, R. P. (2024). ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PERSEDIAAN BERDASARKAN PSAK NO. 14 PADA PT. MODERNA TEHNIK PERKASA. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi* Vol.1, No.2 Juli 2024.
12. Sonifati laoli, S. Z. (2024). Implementasi PSAK Dalam Pencatatan Dan Penilaian Persediaan Barang Pada CV. Bintang Keramik Kota Gunungsitoli. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (Jebma)* Volume : 4 | Nomor 3 | Nopember 2024, 1406-1417.
13. Sulviana, H. (2025). ANALISIS KESESUAIAN PSAK 202 DALAM PENCATATAN PERSEDIAAN BARANG DAGANG DENGAN AKUNTANSI SYARIAH PADA PAPA COOKIES CABANG BANYUWANGI. *Jember: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER*.
14. Tesalonika P.V Tombuku, J. M. (2022). ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PERSEDIAAN BARANG HABIS PAKAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI KABUPATEN MINAHASA. *Jurnal Akuntansi Manado*, Vol 3 No.2, Hal 149-156, Agustus 2022, 149-156.
15. Umar Tauhid, M. S. (2021). ANALISIS AKUNTANSI PERSEDIAAN BARANG DAGANG BERDASARKAN PSAK NO. 14. *JURNAL NERAACA PERADABAN* VOLUME 1, NOMOR 2, MEI 2021, 118-127.